

*Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021



Jl. Dewi Sartika Palu

(0451) 4131656

bnnp.sulteng@bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 388/XII/2015/BNN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Dalam LKIP ini telah diuraikan perencanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dicapai dengan baik.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 akan menjadikan tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2022. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui LKIP Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 2 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| D. Struktur Organisasi..... | 4 |
| E. Sistematika Penyajian..... | 6 |
| | |
| BAB II PERJANJIAN KINERJA..... | 7 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNP SULAWESI TENGAH..... | 10 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 10 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 24 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sehingga dalam upaya mengatasi masalah tersebut maka perlu diambil langkah-langkah terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral antara lain melalui program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan secara *komprensif* dan *multidimensional* dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, Swasta, Pendidikan maupun masyarakat. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak ada satupun Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Kondisi tersebut di atas menjadi dasar pemerintah menetapkan

“Indonesia darurat narkoba”, dengan cara meningkatkan sosialisasi dan kampanye anti narkoba, meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, sedangkan bagi yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba, pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba. Di samping itu seluruh elemen masyarakat Indonesia dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Di Sulawesi Tengah tingkat prevalensi penyalah guna mencapai 2,80% dengan jumlah sebanyak 52.341 orang dan menjadi pasar yang sangat potensial bagi para pengedar. Oleh karena itu dibutuhkan upaya serius dan komprehensif untuk menekan angka penyalahgunaan Narkoba. Presiden telah menginstruksikan kepada Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dan tidak menganggap remeh penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta mengerahkan seluruh kapasitas yang ada untuk pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Hal tersebut ditindak lanjuti Gubernur Sulawesi Tengah yang menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota agar meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana yang ada guna pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, BNNP Sulawesi Tengah sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

C. Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi;
- b. BNNP Sulawesi Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. BNNP Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

BNNP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

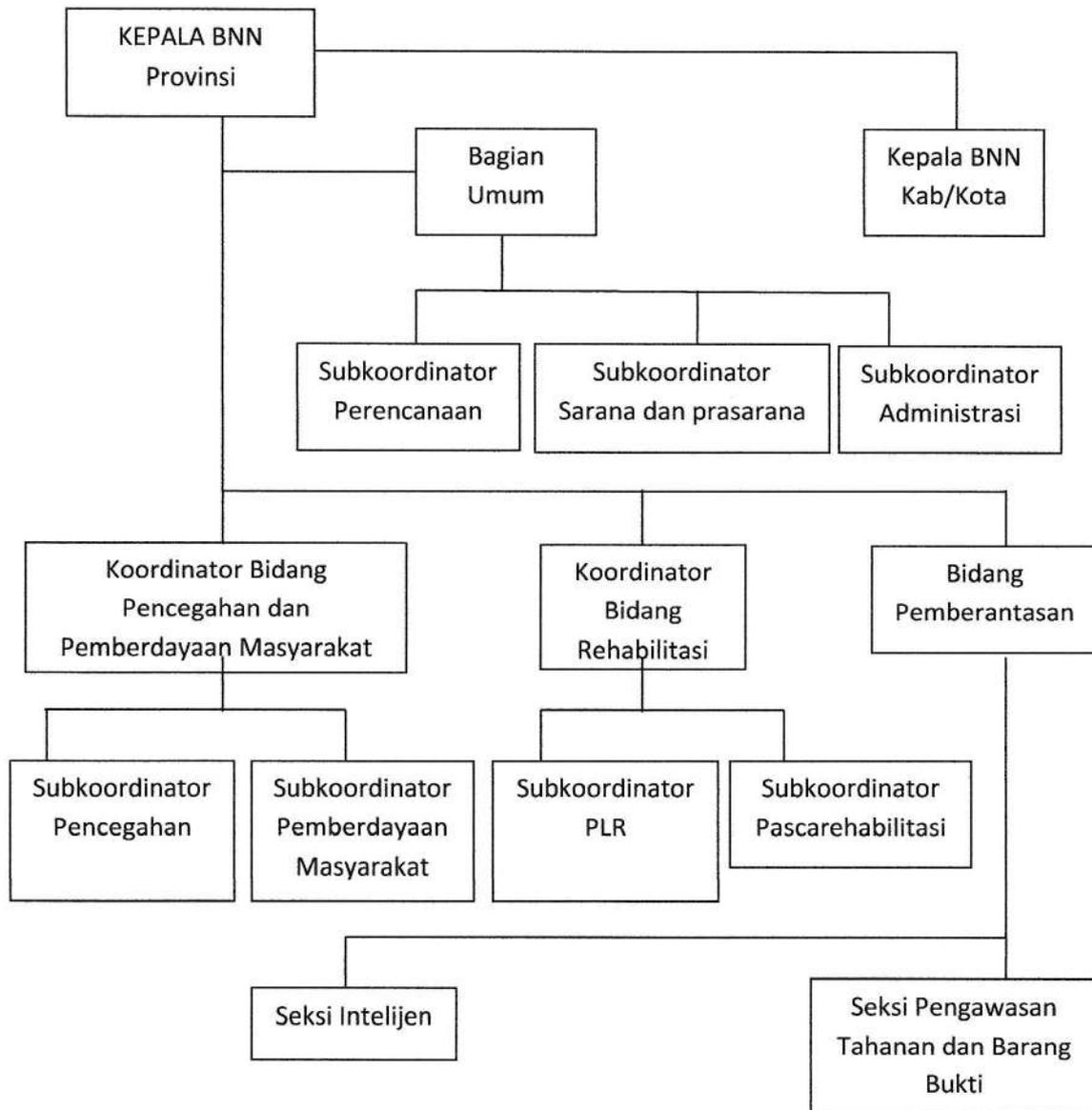
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan;
- d. Bidang Rehabilitasi; dan
- e. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV Penutup.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Target penanganan permasalahan narkoba seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,03% per tahun.

Badan Narkotika Nasional RI dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut :

A. Visi

Mewujudkan Masyarakat yang Terlindungi dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkotika Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

B. Misi

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Secara Profesional.
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Adapun Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 3 Kab/Kota |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 6 Kab/Kota |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi | 6 Kab/Kota |
| 4 | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | 1 Kawasan |
| | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi | 2,69 |
| 5 | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 35 Orang |
| | | Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | 15 Orang |
| 6 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi | 7 Lembaga |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi | 7 Unit |
| 7 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 3,2 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 8 | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan | - |
| 9 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21 | 15 |
| | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan | - |
| 10 | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan | 100 |
| | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | 100 |
| 11 | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21 | - |
| 12 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 92 |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | 6 Kab/Kota |
| 13 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 94 |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | 6 Kab/Kota |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja BNNP Sulawesi Tengah tahun 2021 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja melebihi target, 5 (lima) indikator kinerja tercapai dan 10 (sepuluh) indikator kinerja tidak tercapai.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (tiga belas) sasaran kegiatan tahun 2021 dan penjelasan hasil capaian 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sulawesi Tengah Tahun 2021

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian (%) |
|----|--|--|---------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 3 Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 66,7% |
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 6 Kab/Kota | 6 Kab/Kota | 100% |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks | 6 Kab/Kota | 6 Kab/Kota | 100% |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|--------|
| | kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi | | | |
| 4 | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | 1 Kawasan | 0 Kawasan | 0% |
| | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi | 2,69 | 2,49 | 92,6% |
| 5 | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 35 Orang | 40 Orang | 114,3% |
| | | Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | 15 Orang | 5 Orang | 33,3% |
| 6 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi | 7 Lembaga | 3 Lembaga | 42,8% |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| 7 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 3,2 | 2,8 | 73,7% |
| 8 | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba | Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|--------|
| 9 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21 | 15 | 50 | 333,3% |
| | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan | - | - | - |
| 10 | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba | Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan | 100 | 100 | 100% |
| | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba | 100 | 100 | 100% |
| 11 | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21 | - | - | - |
| 12 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 92 | 88,23 | 95,9% |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | 6 Kab/Kota | 0 Kab/Kota | 0% |
| 13 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 94 | 86,71 | 92,2 |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | 6 Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 33,3% |

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

| | |
|-----------|---|
| 1. | Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
|-----------|---|

Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|---------------|---------------|-------|
| 1. | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 3 Kab/kota | 2 Kab/Kota | 66,7% |

Presentase indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan dan pengaruh untuk menggunakan narkoba.

Pengukuran menggunakan cara survey ketahanan diri kepada kalangan remaja yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja, dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi yaitu :

- Self regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.

- Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target 3 kab/kota, yang terrealisasi yaitu sebanyak 2 kab/kota atau tidak mencapai target (66,7%).

2.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---------------|---------------|------|
| 1. | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi | 6 Kab/Kota | 6 Kab/Kota | 100% |

Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Pengukurannya menggunakan survey ketahanan keluarga dengan menggunakan instrument SDQ (Strength and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent and Family Adjustment Scale), CURM (Child and Youth Resilience Measure).

Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi dengan target 6 kab/kota, yang terrealisasi yaitu sebanyak 6 kab/kota atau mencapai target (100%).

| | |
|-----------|---|
| 3. | Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN |
|-----------|---|

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN diperlukan dalam upaya agar masyarakat di daerah tersebut mempunyai kegiatan positif sehingga tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---------------|---------------|------|
| 1. | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi | 6 Kab/Kota | 6 Kab/Kota | 100% |

Indeks kemandirian partisipasi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para penggiat anti narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, ormas, LSM, paguyuban dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi dengan target 6 kab/kota, yang terrealisasi yaitu sebanyak 6 kab/kota atau mencapai target (100%).

4.

Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dibutuhkan dalam upaya penanganan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|-----------|-----------|----|
| 1. | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | 1 Kawasan | 0 Kawasan | 0% |

Penyebab utama dari tidak tercapainya target kawasan rawan yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada" adalah karena wilayah yang dijadikan target untuk diintervensi berstatus "waspada".

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--------|-----------|-------|
| 2. | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi | 2,69% | 2,49 | 92,6% |

Target nilai keterpulihan kawasan rawan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2,69 dan realisasinya adalah 2,49 atau tidak mencapai target (92,6%)

5.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah diperlukan untuk penanganan penyalahguna atau pecandu narkoba agar tidak kembali lagi mengonsumsi/menyalahgunakan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|----------|-----------|---------|
| 1. | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 35 Orang | 40 Orang | 114,3 % |

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target 35 orang yang terrealisasi sebanyak 40 orang atau melebihi target (114,3%).

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|----------|-----------|-------|
| 2. | Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | 15 Orang | 5 Orang | 33,3% |

Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target 15 orang yang terrealisasi sebanyak 5 orang atau tidak mencapai target (33,3%).

6.

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat diperlukan untuk penanganan penyalahguna atau pecandu narkoba agar tidak kembali lagi mengonsumsi/menyalahgunakan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|-----------|-----------|-------|
| 1. | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi | 7 Lembaga | 3 Lembaga | 42,8% |

Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan target 7 lembaga yang terrealisasi sebanyak 3 lembaga atau tidak mencapai target (42,8%).

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--------|-----------|------|
| 2. | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi | 7 Unit | 7 Unit | 100% |

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan target 7 unit yang terrealisasi sebanyak 7 unit atau mencapai target (100%).

7.

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Kualitas pelayanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi sangat diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai terhadap para pecandu narkoba bias sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--------|-----------|-------|
| 1. | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 3,2 | 2,8 | 73,7% |

Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan target 3,2 telah terrealisasi dengan nilai 2,8 atau tidak mencapai target (73,7%).

8.

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Pengungkapan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan agar ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21 | 15 | 50 | 333,3 % |

Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 adalah jumlah berkas penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilimpahkan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Adapun metode pengukuran yaitu berkas perkara TP Narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh bidang pemberantasan maka diperoleh (data dukung terlampir) :

| Satuan Kerja | Jumlah Berkas P-21 |
|------------------------|--------------------|
| BNNP Sulteng | 26 |
| BNNK Palu | 3 |
| BNNK Donggala | 5 |
| BNNK Poso | 3 |
| BNNK Tojo Una-Una | 2 |
| BNNK Morowali | 8 |
| BNNK Banggai Kepulauan | 3 |
| Total | 50 |

9.

Sasaran : Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

Pengawasan tahanan dan barang bukti sangat diperlukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--------|-----------|------|
| 1. | Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan | 100 | 100 | 100% |

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100.

Maka:

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right]$$

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{81 - (0)}{81} \times 100\% \right] = 100\%$$

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--------|-----------|------|
| 1. | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | 100 | 100 | 100% |

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti sama dengan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

$a_1 =$ untuk barang bukti 1

$a_2 =$ untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka:

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right]$$

Dengan $y =$ jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{81}{81} \times 100\% \right] = 100\%$$

10.

Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--------|-----------|-------|
| 1. | Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 92 | 88,23 | 95,9% |

Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dengan target 92 telah terrealisasi dengan nilai 88,23 atau tidak mencapai target (95,9%).

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|------------|------------|----|
| 2. | Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | 6 kab/Kota | 0 Kab/Kota | 0% |

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target dengan target 6 kab/kota tidak terrealisasi atau tidak mencapai target (0%).

11.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur menggambarkan keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsiya. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--------|-----------|-------|
| 1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah | 94 | 86,71 | 92,2% |

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan target 94 terrealisasi dengan nilai 86,71 atau tidak mencapai target (92,2%).

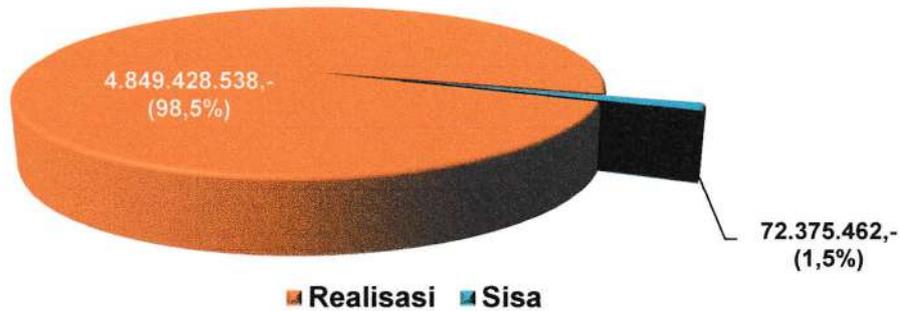
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|------------|------------|-------|
| 2. | Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | 6 Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 33,3% |

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target dengan target 6 kab/kota telah terrealisasi sebanyak 2 kab/kota atau tidak mencapai target (33,3%).

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 BNNP Sulawesi Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.921.804.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

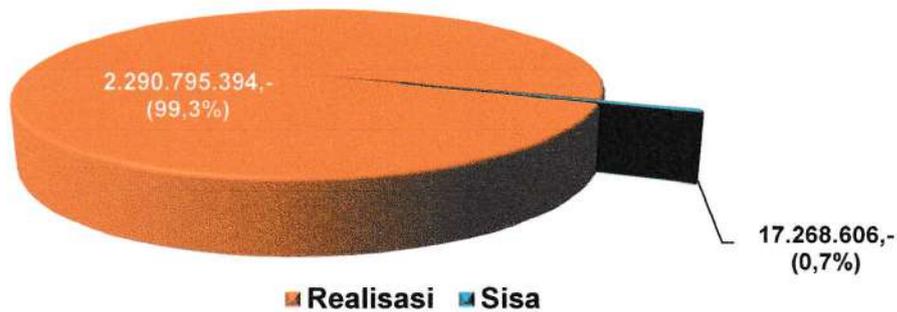
| NO. | PROGRAM | PAGU | REALISASI | % | SISA | % |
|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1. | Belanja Barang | 4.855.704.000 | 4.783.328.538 | 98,5 | 72.375.462 | 1,5 |
| 2. | Belanja Modal | 66.100.000 | 66.100.000 | 100 | 0 | 0 |
| Total | | 4.921.804.000 | 4.849.428.538 | 98,5 | 72.375.462 | 1,5 |



Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu :

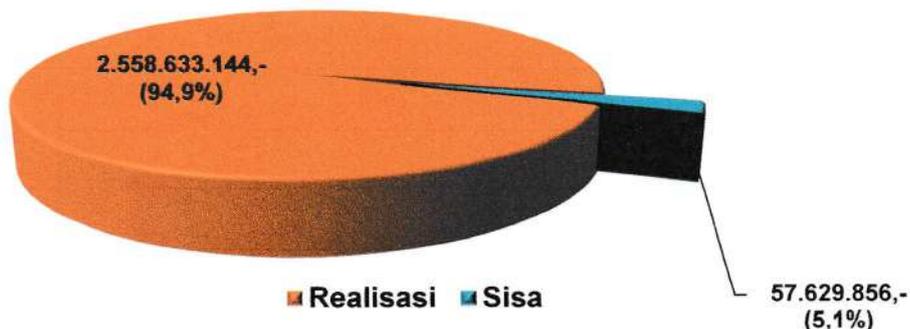
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 2.308.064.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.290.795.394,- (99,3%), sisa anggaran sebesar Rp. 17.268.606,- (0,7%).



2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 2.616.263.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.558.633.144,- (94,9%), sisa anggaran sebesar Rp. 57.629.856,- (5,1%).



Sisa anggaran dari kedua program diatas disebabkan oleh :

- a. Perjalanan Dinas yang disesuaikan real cost perjalanan dinas.
- b. Penyerapan anggaran kehumasan, pengiriman surat, rekening listrik, rekening telepon, rekening internet disesuaikan dengan kebutuhan kantor dalam setiap bulan.

BAB IV PENUTUP

A. PENGUKURAN KINERJA *OUTCOME*.

Pencapaian Indikator Kinerja BNNP Sulawesi Tengah tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

| Urutan | Jumlah IK | Rentang Capaian | Kategori | % |
|--------|-----------|------------------------------------|-------------|------|
| I | 7 | Capaian $\geq 100\%$ | Memuaskan | 41,2 |
| II | 3 | $85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$ | Sangat Baik | 17,6 |
| III | 1 | $70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$ | Baik | 5,9 |
| IV | 1 | $55\% \leq \text{Capaian} < 70\%$ | Cukup | 5,9 |
| V | 5 | Capaian $< 55\%$ | Kurang | 29,4 |

B. PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN

Pencapaian kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 diambil dari nilai pencapaian kinerja pada aplikasi SMART Kemenkeu dengan nilai sebagai berikut :

| Satuan Kerja | Nilai Aspek Implementasi |
|------------------------|--------------------------|
| BNNP Sulteng | 88,23 |
| BNNK Palu | 87,84 |
| BNNK Donggala | 87,04 |
| BNNK Poso | 87,64 |
| BNNK Tojo Una-Una | 87,07 |
| BNNK Morowali | 83,02 |
| BNNK Banggai Kepulauan | 82,97 |
| Nilai Akhir | 86,26 |
| KRITERIA HASIL | BAIK |

C. REKOMENDASI/RENCANA AKSI OPTIMALISASI KINERJA

1. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial, dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.

2. Perlu peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah untuk mendukung program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan).
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, upaya yang akan dilakukan antara lain:
 - a) Menambah target wilayah pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi sasaran kinerja sesuai dengan prioritas kerawanan daerah, program/kegiatan, hasil dan keluaran, serta anggaran yang tersedia.
 - b) Pemberian apresiasi kepada penggiat anti narkoba.
 - c) Pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba.
 - d) Optimalisasi pemanfaatan IT yang ada dan *upgrade* peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk *sharing* informasi.
 - e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga penyidik.
 - f) Semakin meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.